

ABSTRAK

Inflation Reduction Act (IRA) yang disahkan Amerika Serikat pada tahun 2022 bertujuan mempercepat transisi energi bersih, memperkuat industri domestik, dan mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik. Melalui ketentuan *local content requirement* dan *Foreign Entity of Concern* (FEOC), kebijakan ini membatasi keterlibatan perusahaan Tiongkok di pasar kendaraan listrik Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Tiongkok dalam merespons IRA pada sektor baterai kendaraan listrik selama periode 2022-2025. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan yang bersumber dari dokumen resmi, laporan organisasi internasional, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah terkait. Analisis dilakukan menggunakan teori *economic statecraft* David A. Baldwin yang dipadukan dengan konsep *economic lawfare* dari Ferguson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IRA merupakan bentuk proteksionisme hijau yang tidak hanya berorientasi pada tujuan lingkungan, tetapi juga bertujuan mengurangi dominasi Tiongkok dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Sebagai respons, Tiongkok menerapkan strategi melalui jalur non-legal dan legal. Pada jalur non-legal, Tiongkok melakukan origin shifting dengan mengalihkan investasi dan produksi ke negara ketiga. Pada jalur legal, Tiongkok mengajukan gugatan ke *World Trade Organization* (WTO) untuk menentang kebijakan yang dianggap diskriminatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Tiongkok mengkombinasikan instrumen ekonomi dan hukum untuk mempertahankan posisi strategisnya dalam industri baterai kendaraan listrik global.

Kata Kunci: *Inflation Reduction Act*, Tiongkok, Amerika Serikat, baterai kendaraan listrik, *economic statecraft*, *economic lawfare*.

ABSTRACT

The United States' Inflation Reduction Act (IRA), enacted in 2022, aims to accelerate the clean energy transition, strengthen domestic industries, and reduce dependence on China in the electric vehicle (EV) battery supply chain. Through local content requirements and Foreign Entity of Concern (FEOC) provisions, the policy restricts the participation of Chinese companies in the U.S. EV market. This study examines China's strategy in responding to the IRA in the EV battery sector during 2022-2025. Using a qualitative approach and library research method, the study draws on official documents, international organization reports, academic journals, and relevant scholarly publications. The analysis applies David A. Baldwin's theory of economic statecraft combined with Ferguson's concept of economic lawfare. The findings show that the IRA represents a form of green protectionism that serves not only environmental objectives but also geopolitical and economic goals aimed at reducing China's dominance in the global EV battery supply chain. In response, China adopted both non-legal and legal strategies. Through the non-legal approach, China implemented origin shifting by relocating investment and production to third countries. Through the legal approach, China filed a dispute at the World Trade Organization (WTO) against measures it considered discriminatory. The study concludes that China combined economic and legal instruments to maintain its strategic position in the global EV battery industry.

Keywords: *Inflation Reduction Act, China, United States, electric vehicle batteries, economic statecraft, economic lawfare.*